



Kedubes Australia Utang Ke DKI Rp 30 M

Balai Kota, Warta Kota

Kedutaan Besar (Kedubes) Australia di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, menunggak pembayaran untuk izin perluasan tanah sebesar Rp 30 miliar ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. Utang sejak zaman Gubernur DKI Joko Widodo itu belum dibayarkan hingga saat ini.

“(Kedutaan Besar) Australia utang ke Pemprov DKI untuk bayar kena denda SP3L (surat persetujuan prinsip pembebasan lahan/tanah), totalnya Rp 30 miliar. Belum dibayar dari tahun 2012,” kata Heru Budi Hartono, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kamis (26/3).

Heru mengatakan, Kedubes Australia awalnya mengajukan perluasan area kedutaan ke pemprov. Namun, mereka melakukan pembebasan lahan untuk perluasan itu tanpa seizin gubernur dan tanpa SP3L.

“Berdasarkan aturan yang berlaku, tanpa SP3L, yang bersangkutan berkewajiban membayar denda sebesar Rp 30 miliar-Rp 36 miliar sebagai biaya ganti rugi,” kata Heru seperti dilansir *Kompas.com*.

Meski sudah dua tahun lebih denda belum dibayar, kata Heru, Kedubes Australia sempat meminta keringanan. Namun, permintaan keringanan tidak disetujui karena sebelumnya ada permintaan Pemprov DKI yang tidak terwujud untuk melakukan hubungan timbal balik.

Upaya lain adalah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. Namun, upaya itu tidak membuahkan hasil yang memuaskan. “Jawaban (Kedubes Australia) enggak memuaskan. Saya mau menagih. Kementerian juga suruh tagih dan minta Australia bayar,” kata Heru. **(ang)**